

LITERASI BENCANA DI SEKOLAH GUNUNG MERAPI TENTANG MITIGASI BENCANA DAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF

Ali Minanto, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia
minanto.ali@gmail.com

Diajukan: 01-11-2018; Direview: 09-12-2018; Diterima: 18-12-2018;

Abstract

Gunung Merapi School (SGM) takes the initiative to conduct disaster literacy and mitigation education. This research aims to find out how the community uses such as SGM in building disaster literacy, conducting disaster mitigation education. This research uses a media literacy approach and transformative citizenship. It found out disaster literacy is not only given to people who (choose) to live in the 'red zone', but also to tourists and tourist visitors through integrating disaster literacy with key subjects: creativity, environment, and diversity. In addition SGM makes three important activities: independent evacuation, mitigation scenarios, and designing a disaster SOP. Utilization of new media is also carried out in order to introduce participatory literacy activities and address certain critical issues. This is not only beneficial in terms of disaster literacy, but also seeks the most effective formulation to look back at regulations related to the status of the Merapi region.

Keywords: gunung merapi school, transformative citizenship, disaster mitigation, media literacy

Abstrak

Sekolah Gunung Merapi (SGM) mengambil inisiatif untuk melakukan literasi bencana dan pendidikan mitigasi bencana. Riset ini berpretensi untuk mengetahui bagaimana cara yang digunakan komunitas seperti SGM dalam membangun literasi bencana dan melakukan pendidikan mitigasi bencana. Riset ini menggunakan pendekatan literasi bencana, literasi media dan transformative citizenship. Hasil dari literasi kebencanaan SGM tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang (memilih) tinggal di 'zona merah', tapi juga kepada pelaku wisata dan para pengunjung wisata melalui mengintegrasikan literasi kebencanaan dengan mata pelajaran utama: kreativitas, environment, dan diversity. Selain itu SGM membuat tiga aktivitas penting: evakuasi mandiri, skenario mitigasi, dan merancang SOP kebencanaan. Pemanfaatan media baru, juga dilakukan guna mengenalkan aktivitas literasi kemitigasian dan pengangkatan isu kritis tertentu. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam hal literasi kebencanaan, tapi juga mencari formulasi paling efektif untuk melihat kembali regulasi terkait status kawasan Merapi.

Kata Kunci: sekolah gunung merapi, transformative citizenship, mitigasi bencana, literasi media.

PENDAHULUAN

Pasca erupsi Merapi tahun 2010, beberapa kawasan di sekitar gunung Merapi ditetapkan sebagai KRB (Kawasan Rawan Bencana) III. Status ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi steril dari segala bentuk aktivitas kehidupan. Status KRB III ditetapkan dengan mengacu pada UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini mengafirmasi kawasan sekitar Merapi menjadi "zona merah" yang tidak dapat dihuni ataupun sebagai ruang aktivitas sosial. Konsekuensinya, kawasan ini tidak menjadi

target pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lain, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya karena dianggap tidak ada kehidupan. Regulasi ini juga tidak memberi peluang cairnya Alokasi Dana Desa di lereng Merapi.

Kebijakan KRB III menyimpan ambiguitas. Di satu sisi, daerah ini harus dinihalkan dari seluruh aktivitas kehidupan, tapi di sisi lain warga masih memiliki ketergantungan dengan Merapi, terutama untuk aktivitas pertanian dan peternakan. Memulai kehidupan baru dengan tinggal di hunian tetap (huntap), tempat relokasi warga yang disediakan

oleh pemerintah daerah, tidak cukup memberi solusi bagi kebutuhan warga. Sebagian besar warga yang berprofesi sebagai petani dan peternak memilih kembali ke lereng Merapi untuk menggarap lahan pertanian dan mencari sumber makanan ternak. Aktivitas penambangan pasir juga semakin intensif pasca erupsi. Limpahan pasir yang masif memicu semakin banyak perusahaan penambang pasir yang beroperasi di lereng Merapi. Selain itu, jejak erupsi Merapi juga memiliki daya tarik wisata. Setiap harinya, kawasan Merapi menjadi destinasi wisata yang mengundang banyak pelancong. Ada beberapa paket wisata yang ditawarkan kawasan ini, seperti lava tour, kuliner khas Merapi, kastil Merapi, dan sebagainya. Kawasan Merapi yang divonis sebagai zona merah bagi aktivitas hidup pada kenyataannya justru menjadi medan hidup baru yang lebih ramai.

Ambiguitas status kawasan ini menimbulkan banyak polemik. Dari dimensi pembangunan, kawasan ini mustahil menjadi target pengembangan infrastruktur karena label sebagai zona merah yang meniscayakan nirkehidupan. Sementara sebagai daerah tujuan wisata, kawasan ini akan dikunjungi oleh banyak pelancong yang harus dijamin keselamatannya saat Merapi kembali mengalami erupsi dalam situasi yang tak terprediksi. Dalam hitungan kasar, setidaknya ada ribuan wisatawan yang menikmati kawasan ini di setiap akhir pekan. Jumlahnya akan semakin bertambah di hari libur. Jika tidak ada upaya antisipasi bahaya bencana, tidak menutup kemungkinan akan jatuh korban dalam skala yang lebih massif. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lain penting dalam konteks mitigasi bencana. Evakuasi masyarakat yang masih memilih tetap tinggal di lereng Merapi dan para penikmat wisata membutuhkan sarana jalan yang layak. Saat ini, jalur transportasi yang ada merupakan hasil swadaya masyarakat dengan kondisi yang masih jauh dari ideal.

Mitigasi bencana tidak hanya memerlukan sarana evakuasi yang baik, seperti infrastruktur fisik, tapi juga membutuhkan kesadaran kolektif warga terhadap bencana. Sayangnya, literasi bencana masih sangat minim dilakukan di kawasan Merapi. Beberapa komunitas cukup giat merespons situasi tersebut. Salah satunya adalah Sekolah Gunung Merapi (SGM). Sekolah Gunung

Merapi didirikan oleh sepasang suami istri, Fajar Radite dan Jasmine. Fajar adalah seorang aktivis yang peduli pada isu sosial, lingkungan, dan kebencanaan. Sementara Jasmine berasal dari Kota London Inggris dan merupakan seorang aktivis pendidikan. Sekolah Gunung Merapi didedikasikan sebagai lembaga pendidikan informal bebas biaya untuk masyarakat di kawasan lereng Merapi.

Tulisan ini akan mengulas upaya yang dilakukan oleh Sekolah Gunung Merapi (SGM) dalam melakukan gerakan pedagogic sekaligus mengenalkan dan menanamkan kesadaran tentang kebencanaan. Kesadaran voluntaristik SGM menjawab persoalan krusial yang jamak dialami warga di kawasan Merapi. Secara aktif, SGM menyuarakan sikap-sikapnya melalui blog 'sekolahgunungmerapi.wordpress.com' dan media sosial lain. Gagasan SGM yang tertuang dalam beberapa tulisan berkait dengan kebijakan KRB 3, mekanisme pendidikan, pengetahuan mitigasi bencana, kesadaran lingkungan dan pelbagai kreativitas lain yang dibutuhkan masyarakat di lereng Merapi. Tawaran gagasan yang diproduksi SGM melalui media baru dapat bertransformasi menjadi kesadaran mitigasi kebencanaan warga.

LITERATUR DAN METODOLOGI

Beberapa pendekatan digunakan untuk menopang riset ini. *Pertama*, Literasi bencana atau literasi penanggulangan bencana (Disaster Risk-Reduction (DRR) Literacy). UNISDR (United Nations Strategy for Disaster Reduction) mendefinisikan DRR sebagai konsep dan aktivisme mengurangi risiko bencana melalui cara sistematis untuk menganalisis dan mereduksi faktor-faktor penyebab bencana (UNISDR, 2007).

'The conceptual framework of elements considered with the purpose of minimizing vulnerabilities and disaster risks thought a society in order to avoid (prevention) or to limit (mitigation and preparedness) the adverse impacts of hazards, and facilitate sustainable development' (UNISDR, 2007).

Kedua, konsep literasi media. Pendekatan ini untuk melihat bagaimana komunitas dan warga memanfaatkan media informasi (digital) sebagai kanal untuk membangun kesadaran

mitigasi bencana; *ketiga*, kewargaan transformatif (*transformative citizenship*). Pendekatan ini menelisik peran aktif warga dalam menjalankan perannya sebagai warga negara yang proaktif. Dalam hal ini, warga tidak hanya menjadi penonton, tapi secara aktif memperjuangkan hak dan kepentingan mereka meskipun negara tidak hadir (*absent*). Konsep kewargaan melihat eksistensi warga dalam ruang sosial yang menjadi basis status formal beserta hak-haknya (Stoke, 2018:25). Mengacu pada pemikiran tentang hak kewargaan yang diintroduksi oleh Marshall (1992), ada tiga tipologi hak yang dimiliki setiap warga negara: sipil, politik, dan sosial. Hak sipil meliputi perlindungan keamanan, akses keadilan, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dll; hak politik meliputi hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam arena publik dan proses politik; dan Hak sosial mencakup hak kesejahteraan, jaminan kesehatan, dsb.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah pemanfaatan literature (dokumen) dan *field research* (observasi) dan *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap pihak Sekolah Gunung Merapi (SGM) yang diwakili oleh pemilik dan pimpinan sekolah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Gunung Merapi

SGM berdiri pada Desember 2015. Di awal keberadaannya, SGM menyelenggarakan kelas bahasa Inggris untuk masyarakat yang berprofesi sebagai pramuwisata di Desa Kinahrejo di lereng Merapi. Kemampuan berbahasa Inggris dirasa penting bagi masyarakat, terutama pelaku wisata, karena mereka berpapasan langsung dengan para pelancong dari berbagai penjuru dunia yang tertarik untuk “menikmati” jejak erupsi Merapi. Di sini, SGM berperan sebagai katalisator untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di area wisata, terutama dalam penguasaan bahasa Inggris. SGM memberi pelatihan bahasa Inggris kepada masyarakat, terutama para pengemudi jeep yang menggerakkan wisata jeep lava tour. Saat ini SGM memiliki 35 murid yang terdiri dari anak kelas 2 SD hingga SMU dengan durasi tiga jam dalam seminggu. Materi pembelajaran yang ditawarkan

meliputi: Bahasa Inggris, kreativitas, literasi, dan kesadaran lingkungan.

Status kawasan Merapi sebagai KRB 3 menyebabkan SGM merasa terpenggil untuk terlibat secara aktif dalam proses perbaikan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di kawasan Merapi. Dalam dinamikanya, SGM juga berkomitmen untuk melayani dan memberdayakan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal melalui pendidikan dan seni. Hal itu tercemin dari kurikulum yang dirancang.

“Kami adalah sekolah ‘non-profit’, yang bertujuan untuk melayani dan memberdayakan masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi serta melestarikan kearifan dan budaya lokal melalui pendidikan dan seni. Kami tidak terkait dengan organisasi manapun atau pemerintah, dan semua yang terlibat di sekolah adalah relawan yang tidak dibayar.”

Keterlibatan para relawan menjadi aspek penting dalam keberadaan dan aktivitas SGM. Para relawan berperan sebagai guru yang mendukung beragam materi yang dikenalkan SGM, seperti seni, budaya, bahasa Inggris, dan sebagainya. Selain itu, SGM juga memberikan literasi kebencanaan (mitigasi bencana). Mitigasi bencana penting dikenalkan karena masyarakat Merapi hidup dalam ruang yang sangat rentan dengan ancaman bencana. Merapi memiliki karakter yang tak terprediksi. Pemahaman terhadap kebencanaan menjadi salah satu muatan dalam proses pembelajaran di SGM. Literasi kebencanaan bagi warga penting karena tidak hanya menghasilkan potensi destruktif tapi karena sering dibarengi oleh erupsi informasi palsu (hoaks).

Sementara itu, mekanisme pembiayaan SGM menggunakan model pendanaan komunitas. Kebutuhan ruang kelas, ongkos listrik, dan akomodasi relawan disediakan oleh komunitas lokal Desa Pangukrejo. Selain itu, pembiayaan operasional juga menggunakan donasi pribadi.

“Our main operational costs are secured through a community funding model; our school space, electricity usage and accomodation for our volunteers are all provided by the local community of Pangukrejo. It is only because

of this high level of support from the local community that we are able to exist and offer all our services for free. Apart from that, our other operational costs originate from private donations.”

Status zona merah untuk kawasan Merapi menyebabkan SGM cukup susah untuk mengakses bantuan dari luar. Sistem administrative yang berlaku tidak memungkinkan bantuan dapat didatangkan dan diberikan untuk membiayai segala bentuk aktivitas di kawasan ini. Ada beberapa donasi yang akhirnya sampai di SGM, seperti bantuan dari sebuah NGO dari Australia. SGM memuatnya pada tanggal 25 Agustus 2017:

Last year, at the same time that we launched our crowdfunding campaign with Books for the World, the small Australian based NGO also helped us to secure a donation of a CPU. Thanks to the help of multiple friends and supporters, that CPU has at last arrived at SGM! (Special thanks to Hari, Sam, Joel and Books for the World!)

SGM dan Literasi Bencana

Label KRB III yang dilekatkan untuk kawasan lereng Merapi terkesan beraroma politis (Radit, 2018). Regulasi yang menopangnya juga cenderung bias karena hanya mengatur warga yang akan keluar dari lereng Merapi dan tidak memperhatikan warga yang tetap bertahan di Merapi. Ketidakhadiran ‘negara’ di kawasan ini, menyebabkan SGM tidak hanya fokus pada pendidikan dan Community Development tapi juga melakukan fungsi pendidikan mitigasi kebencanaan. Potensi wisata yang muncul pasca erupsi, mendorong SGM untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kemampuan warga dalam menghadapi wisatawan, seperti workshop tentang hospitality bussiness selain kemampuan evakuasi mandiri. SGM mengintegrasikan literasi kebencanaan dengan mata pelajaran utama: kreativitas, environment, dan diversity.

Kesadaran warga terhadap erupsi Merapi sebenarnya tumbuh sebagai pengetahuan lokal yang diwarisi secara turun temurun. Warga sangat awas membaca kondisi alam. Akan tetapi, erupsi 2010 meninggalkan jejak traumatik yang sangat

kuat dan dalam bagi warga (Radit, 2018). Saat ini, sebagian warga masih panik saat menghadapi aktivitas Merapi seperti ketika terjadi letusan freatik pada bulan Mei 2018. Kepanikan warga juga dipicu oleh sebaran informasi palsu (hoaks) yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana dikatakan Fajar:

“Erupsi Merapi berhadapan dengan erupsi informasi. Persebaran hoaks lebih cepat ketimbang informasi yang akurat. Warga Merapi harus menghadapi dua kemungkinan bencana itu: Merapi dengan aktivitas vulkaniknya dan media sosial dengan persebaran berita bohongnya. Mitigasi memerlukan pemahaman yang komprehensif, tidak hanya tentang menghadapi alam, tapi juga melawan manipulasi informasi. Kecepatan persebaran berita hoax sering dimanfaatkan pedagang sapi untuk membeli sapi-sapi warga di lereng Merapi dengan harga murah.” (wawancara 9 Agustus 2018)

Untuk menanamkan pengetahuan tentang kemitigasian, SGM membuat pembagian target audiens: orang tua, remaja, dan anak-anak. Sasaran kelompok orang tua lebih menekankan pada kesadaran sosial ekonomi. Warga yang memilih tinggal dan bertahan di lereng Merapi masih merawat ritual sosial seperti upacara yang berkaitan dengan Merapi dan rutinitas warga lainnya. Alasan sosial ini pula yang menyebabkan sebagian warga tidak tertarik untuk tinggal di area hunian tetap (huntap). Selain tata ruang yang tidak mengakomodasi ritus sosial budaya juga tidak mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan ruang hidup. Alasan lain adalah ekonomi. Warga tidak dapat meninggalkan kawasan lereng Merapi dengan alasan ternak, tambang, dan wisata.

Target anak-anak lebih menekankan pada trauma healing. Ada beberapa aktivitas literasi yang diorientasikan untuk anak-anak yang diintegrasikan ke mata pelajaran reguler. SGM juga membuat beberapa gimik untuk lebih menarik perhatian anak-anak, seperti mengadakan lomba menggambar, mengundang nara sumber yang kompeten, mewadahi kreativitas anak, animasi, poster, serta pelatihan foto dan video. Anak-

anak juga mulai dikenalkan istilah-istilah yang berkaitan dengan erupsi melalui bahasa yang mudah dipahami. Sementara target remaja lebih menitikberatkan pada bentuk voluntarisme dengan menempatkan mereka sebagai fasilitator yang aktif.

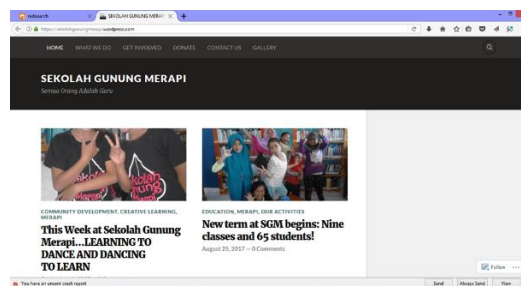
Secara umum, SGM membuat tiga aktivitas penting: evakuasi mandiri, skenario mitigasi, dan merancang SOP kebencanaan. SGM memulai dengan membuat translasi istilah-istilah dalam mitigasi dan vulkanik dengan bahasa atau metafora yang mudah dimengerti, seperti istilah freatic yang dimetaforkan dengan kentut, magmatik sama dengan berak. Melalui metafor yang sederhana dan mudah dipahami, warga akan semakin cerdas dalam menyikapi erupsi-erupsi yang terjadi sehingga dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat. Warga dilatih untuk melakukan evakuasi mandiri sesuai dengan SOP yang disusun dengan mempertimbangkan budaya dan pengetahuan lokal. Anak-anak juga diberi pemahaman yang mudah seperti dalam tindakan evakuasi, mereka dikenalkan istilah KKN: kalem, kumpul, nunggu. Dengan demikian, anak-anak tidak panik dan trauma dalam menghadapi bencana. Anak-anak juga dikenalkan cara menyayangi hewan piaraan, bagaimana mengevakuasi, dan membawanya.

SGM juga memanfaatkan media baru, terutama media sosial. Melalui media daring, SGM dapat menyuarakan pesan-pesan kemitigasian secara luas. Ada beberapa platform media sosial yang digunakan SGM: website, blog, facebook, instagram yang bergerak secara simultan untuk mengenalkan SGM dan aktivitas literasi kemitigasian yang dikenalkan. Beberapa tulisan cukup kritis menyoroti status KRB III, aktivitas pertambangan, dan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah. Fajar menggambarkan saat ini warga Merapi harus berhadapan dengan setidaknya tiga kekuatan: Merapi dengan aktivitas eruptifnya, negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah, dan mafia penambangan pasir yang beroperasi di lereng Merapi. Penambangan pasir Merapi masih menjadi persoalan yang akut. Selain memperparah kerusakan jalan, penambangan pasir telah memicu krisis lingkungan yang membahayakan. Selain memicu guguran dan mempermudah jalur awan panas, aktivitas tamban juga menstimulasi munculnya konflik sosial

(keterbelakan sikap masyarakat), memanfaatkan jalur evakuasi, dan menyebabkan polusi debu dan gangguan pernafasan. Menurut Fajar, ke depan, ancaman mafia pasir justru lebih berbahaya ketimpang erupsi gunung Merapi.

BLOG: Wadah Jurnalisme Warga

Pada 3 April 2017, Fajar Radit mengunggah tulisan bertajuk 'Premanisme Negara di Lereng Merapi'. Sebuah kritik atas kebijakan baru pemerintah desa dan kabupaten terkait peraturan retribusi wisata di lereng Merapi. Kebijakan pemerintahan desa dan kabupaten untuk membongkar portal pintu masuk wisata lava tour menuai protes warga. Warga berdalih selama ini lava tour adalah potensi wisata yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat. Protes warga juga muncul karena dinas terkait memberlakukan model retribusi baru yang mengambil 40% dari biaya retribusi ke kawasan Merapi. Peraturan baru tersebut semakin menguatkan ambiguitas negara (pemerintah daerah). Negara yang absen dan mengharamkan aktivitas kehidupan di lereng Merapi, tiba-tiba datang sebagai pemungut retribusi.



Gambar 1. Tampilan Pemanfaatan Medium Internet SGM sebagai Wadah Jurnalisme Warga

Tulisan Fajar menggambarkan secara cukup detail asal mula berkembangnya wisata lava tour di kawasan Merapi. Dimulai dari moda ojek untuk mengangkut para pelancong hingga munculnya komunitas jeep lava tour yang semakin semarak. Pada mulanya aktivitas wisata ini dianggap berbahaya oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dalam perkembangannya, pemerintah daerah justru tertarik untuk mengelolanya. Protes Fajar Radite melalui blog mendapatkan banyak respons sehingga membuka ruang diskursif yang membuat

persoalan status KRB 3 perlu ditilik kembali. KRB 3 bisa dilihat ulang secara normatif ataupun dengan memperhatikan kondisi riil yang berlangsung di lereng Merapi.



Gambar 2. Ekspresi protes warga di lereng Merapi

Pandangan Fajar Radite yang tertuang dalam blog “sekolahgunungmerapi” memicu diskursus yang melibatkan publik. Merapi dan status KRB 3 tidak hanya menjadi persoalan yang dihadapi warga di lereng Merapi, tapi juga menyita perhatian dari masyarakat dari berbagai kalangan dan kawasan. Melihat kekuatan pengaruh media baru seperti blog, tidak heran jika blog menjadi menjadi titik tolak lahirnya jurnalisme warga (Nazaruddin, 2009). Melalui blog, setiap warga dapat menjadi seorang jurnalis yang dapat memotret dan melaporkan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Platform ini juga digunakan untuk menyuarakan gagasan dan menyatakan sikap tentang suatu persoalan sosial. Blog memungkinkan penggunaannya mengabarkan aktivitas keseharian, saling menyampaikan komentar, dan berbagi peristiwa (Blood, 2000). Tidak berlebihan jika dalam perspektif Habermasian, keberadaan blog dimaknai sebagai ruang publik (virtual) karena memungkinkan adanya representasi dan partisipasi publik secara luas. Ruang publik menjadi tempat bersemai gagasan yang berjaln secara diskursif.

Pemanfaatan blog sebagai sarana informasi telah berkembang di Amerika pada tahun 1988 pasca pemilihan presiden. Kegagalan media mainstream menyebabkan warga berpaling ke media alternative seperti blog. Media mainstream

dianggap terlalu bias pada kepentingan politik dan cenderung menyuguhkan berita-berita yang banal serta menjadi sarana melakukan kampanye hitam. Kemenangan George Bush atas lawan politiknya dalam pemilihan presiden, Michael Dukakis, mencerminkan lemahnya media sehingga mudah ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam situasi itulah blog muncul sebagai ruang yang dianggap mampu mengakomodasi suara publik.

Di Indonesia, blog marak pada kurun 2000-an. Ada berderet blog yang dikelola masyarakat dan menjadi ruang pembelajaran sekaligus menjadi sarana jurnalisme warga. Beberapa di antaranya adalah halamansatu.net, wikimu.com, panyingkul.com, dsb. Sebuah blog yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan Ciamis, www.sekolahpetani.com, dianggap sebagai salah satu bentuk praktek jurnalisme warga dengan pemanfaatan media baru (Nazaruddin, 2009:64). Pun beberapa blog yang merepresentasikan beragam suara dari pelbagai tempat. Lantas, bagaimana bentuk jurnalisme warga yang dilakukan SGM melalui blognya?

Dalam beberapa definisi, jurnalisme warga dimaknai sebagai aktivitas jurnalistik yang tidak dilakukan oleh jurnalis profesional, tetapi oleh masyarakat umum yang selanjutnya dipublikasikan secara online (Habibi, 2007:116). Pengertian ini mengisyaratkan dua poin penting dalam jurnalisme warga: keberadaan internet sebagai medium dan warga biasa sebagai pelaku jurnalisme. Perkembangan fenomenal jurnalisme warga nampak pada sebuah portal OhMyNews.com yang berkantor di Seoul, Korea Selatan, yang online pertamakali pada 22 Februari 2000. Portal ini memiliki slogan ‘every citizen is a reporter’ dengan puluhan ribu reporter yang tersebar di seluruh dunia (Dewi dalam Nazaruddin, 2009:66).

Blog <http://sekolahgunungmerapi.wordpress.com> dibangun pada 2015 dengan slogan ‘Semua Orang adalah Guru’. Ada beberapa topik yang disajikan dalam blog ini, yaitu Community Development, Creative Learning, Merapi, Education, Our Activities, Libraries and Literacy, Volunteering, dan sebagainya. Dalam dinamikanya selamanya dua tahunan, blog ini telah menampilkan ide-ide terkait Merapi, baik berupa berita-berita ringan tentang aktivitas dan rutinitas di SGM sampai tulisan yang kritis terhadap kebijakan

pemerintah daerah.

Demos dan Media Baru

Demos, sebagai aktor utama dalam demokrasi, adalah resultan dari proses diskursif yang berlangsung dalam transformasi demokrasi. Melalui proses diskursif, demos mampu menyuarakan gagasan-gagasannya tanpa rasa takut, terutama dalam relasi dengan negara. Keberadaan demos memberi peluang berlangsungnya demokrasi deliberative yang sanggup memanfaatkan ruang publik sebagai *meeting point* bagi berlangsungnya dialektika ide. Kehadiran media baru memberikan ruang yang cukup besar bagi transformasi demos secara akseleratif dan radikal. Beberapa kasus bisa dijejerkan untuk mengukur kekuatan media baru.

Media menjadi entitas penting dalam demokrasi. Media yang diidealisi sebagai penjaga kebebasan terlihat ketika memberikan akses seluas-luasnya kepada semua pihak dalam menyuarakan sikap (Jeffres, 1986). Keberadaan media baru semakin mencairkan atmosfer demokrasi. Media baru memberi ruang partisipasi warga yang sangat luas. Politik yang pada mulanya terkesan kaku dan eksklusif sontak menjadi ranah publik. Sebagaimana reduksi aural dalam gagasan Walter Benjamin untuk menggambarkan situasi ketika fotografi muncul dan meluruhkan aura karya seni lukis. Kultul terhadap seni menjadi luntur karena digerogoti oleh seni baru yang dianggap lebih egaliter. Jeff Jarvis (2009) menggambarkan media baru sebagai instrument yang memberikan influensi positif bagi kehidupan manusia. Kehadiran media baru memungkinkan setiap orang berbicara kepada dunia, menemukan diri, menemukan dan menyebarkan informasi dengan menantang cara-cara lama. Jarvis memberikan ilustrasi bagaimana kekuatan blogosphere dapat memicu gerakan populer yang sanggup membuat panic public relation perusahaan Dell (dalam Hapsari, 2014: 230).

Kisah sukses tentang peran (new) media dalam perubahan sosial politik menjadi catatan penting bagi keberadaan media ke depan. Menurut Nunung Parjant0, new media telah mengubah peradaban komunikasi. Pengaruh new media menjelaskan pergeseran lokus kuasa yang pada mulanya memusat (konvergen) menjadi kuasa yang sporadik (divergen) sebagaimana kuasa dalam

konsepsi Foucauldian. Revolusi yang berlangsung di Mesir dan Tunisia tidak dapat dilepaskan dari intervensi media baru. Said Sadek, sosiolog Mesir, menggambarkan revolusi yang dipicu oleh kegelisahan anak muda dan kalangan menengah kota tentang kepincangan sosial dan saling berbagi ide-ide perubahan berlangsung melalui sms, email, blog, facebook, dan twitter (Abugaza, 2013:69). Hari itu, 17 Desember 2010, ketika Bouazizi membakar diri, seseorang mengunggah tubuhnya ke facebook, twitter, dan Youtube. Dalam sekejap 23.240 orang memberi tanda “suka” dan videonya yang ditayangkan Al Jazeera dilihat oleh 104.775 orang. Dan dunia menyaksikan heroisme yang dilakukan Muhamed Bouazizi, pemuda 26 tahun yang rela mengorbankan jiwanya demi membela harga diri dan melawan tirani, melalui media sosial yang tersebar secara kilat. Aksi Bouazizi disinyalir menjadi pemicu “Arab Spring” yang menyebabkan pergolakan sekaligus menginspirasi gerakan revolusioner di beberapa negara Arab dan Afrika Utara: Mesir, Mauritania, Aljazair, dan Maroko (Heywood, 2013).

Kedigdayaan media sosial juga dapat dilihat pada fenomena *Electronic Disturbance Theatre*, aktivis cyber yang terlibat dalam merancang teori dan praksis tentang ECD (*Electronic Civil Disobidience*). Mereka adalah kawan seniman *hacker* Mexico, yang secara aktif mengintervensi situs resmi pemerintah untuk mendukung perjuangan otonomi Zapatista. Mereka membuat *mailing list*, mengundang partisipasi siapa saja, di manapun. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokratisasi di ruang maya, setidaknya mengesampingkan bentrok fisik di ruang nyata. (Krisna Murti, 2009: 35). Aktivis lain yang sangat populer adalah Aaron Swartz. Pada umur 25, ia menggerakkan puluhan juta pengguna internet untuk menggagalkan undang-undang SOPA di senat AS. Undang-undang SOPA dimaksudkan untuk menjaga hak cipta industri kreatif Amerika dari pembajakan, yang pada praktiknya justru menghambat transformasi pengetahuan.

Media baru hadir dan dihadirkan ketika saluran utama media tidak sanggup menyampaikan suara keberpihakan. Hachten (2005:271) “...democratic society without independent news media is impossible to imagine.” Media yang independen menjadi syarat penting bagi lahirnya masyarakat

demokratik. Karakter media semacam inilah yang dapat menghasilkan informasi yang terpercaya (well informed). Seperti yang disitir Norberto Bobbio (dalam McNair, 2003:17): "liberal democracy assumes that citizens, once they are entrusted with the right to choose who govern them, are sufficiently well-informed to vote for the wisest, the most honest, the most enlightened of their fellow citizens."

Melalui media sosial misalnya, suara-suara dapat disalurkan dan diperjuangkan sampai bermuara pada perubahan. Terlepas dari posisi medsos yang rentan, kanal ini cukup menjanjikan untuk mengakumulasi dan mengonstruksi suara publik. Mengacu pada idealisasi ruang publik dalam perspektif Habermasian sebagai medan diskursus publik, yaitu ruang belangsungnya diskusi dan konsensus yang rasional (Habermas, 2006: 74-75). Konsep ruang publik mengacu pada situasi ketika kelompok borjuis Eropa abad 18 menciptakan ruang publik untuk individu dan kelompok untuk berkumpul dan berdiskusi menghasilkan diskursus yang dapat mempengaruhi kebijakan negara. Perbincangan tidak hanya terjadi di organ-organ politik dan institusi informasi formal, tapi juga di ruang-ruang biasa seperti kafe dan salon.

It is no coincidence that these concepts of the public sphere and public opinion arose for the first time only in the eighteenth century. They acquire their specific meaning from a concrete historical situation. It was at that time that the distinction of "opinion" from "opinion publique" and "public opinion" came about. Though mere opinions (cultural assumptions, normative attitudes, collective prejudices and values) seem to persist unchanged in their natural form as a kind of sediment of history, public opinion can by definition come into existence only when a reasoning public is presupposed. Public discussions about the exercise of political power which are both critical in intent and institutionally guaranteed have not always existed – they grew out of a specific phase of bourgeois society and could enter into the order of the bourgeois constitutional state only as a result of a particular constellation of interests. (Habermas, 2006: 73)

Gagasan-gagasan SGM yang tertuang dalam media baru tentang Merapi, baik terkait status area maupun aktivitas literasi mitigasi bencana, dapat menjadi ruang yang memproduksi diskursus publik. Diskursus yang berlangsung dapat bertransformasi menjadi kesadaran publik untuk kemudian berakumulasi menjadi kekuatan penekan terhadap kebijakan negara. Kehadiran blog sebagai media jurnalisme warga memberi harapan akan mekanisme produksi dan konsumsi informasi yang berasal dan bermuara pada kepentingan publik. Kondisi ini menepis pola media mainstream yang berkarakter satu arah (*one way communication*). Dalam jurnalisme warga, publik adalah produsen sekaligus konsumen informasi. Idealisasi Habermasian atas ruang publik menemukan bentuknya pada media yang diinisiasi oleh komunitas dalam bentuk media baru, seperti blog. Terlepas dari beberapa catatan yang menunjukkan kelemahan media baru, melalui blog dan aktivitas jurnalisme warga, warga negara dapat bertransformasi menjadi demos, warganegara yang aktif menyuarakan gagasan dan sikap untuk berdialektika dengan negara.

Transformatif Citizenship: dalam Literasi Kebencanaan

Upaya yang dilakukan Fajar dan Jasmine membuka peran kewarganegaraan secara aktif dalam konteks mitigasi bencana. Peran aktif tersebut merupakan bentuk inisiatif partisipatoris mereka menyikapi situasi di kawasan Merapi setelah ditetapkan sebagai KRB 3. Melalui SGM, keduanya membangun kesadaran warga tentang pentingnya melakukan antisipasi bencana. Peran kewarganegaraan seperti ini bisa disejajarkan dengan gagasan Alfred Marshal tentang citizen as gentleman. Adagium *everyman is a gentleman* merupakan ilustrasi Alfred Marshall tentang peran intelektual dalam mengubah ketimpangan sosial abad 19 dalam masyarakat industri yang baru tumbuh (Robet:81). Untuk menggambarkan posisi warganegara dalam dimensi yang lebih kompleks, relasi dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hak individual vis a vis negara, Marshall mengajukan terma *social citizenship*. Usaha-usaha yang dilakukan warganegara dalam melakukan aktivisme yang bersifat transformative memungkinkan sebuah perubahan sosial politik

terjadi, terutama bagaimana warga merespons isu kebencanaan.

Kesadaran tentang mitigasi bencana sangat diperlukan warga yang tinggal di kawasan rentan bencana seperti Merapi. Mengacu pada Coppola dan Maloney (2009: 53-55), setidaknya ada empat komponen dalam manajemen bencana: pertama, mitigation yang mencakup eliminasi dan reduksi komponen risiko bahaya; kedua, *preparedness*. Komponen ini menekankan bagaimana cara memberi kelengkapan pada orang yang memiliki risiko bencana dan bagaimana meningkatkan kemampuan bertahan serta meminimalkan berbagai risiko, termasuk finansial; ketiga, respons, tindakan untuk mengurangi dampak bencana; keempat, *recovery*: meliputi perbaikan, rekonstruksi, dan upaya untuk mengurangi dampak bencana di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Komitmen yang dimiliki para aktivis terhadap isu kebencanaan memberi angin segar bagi proses literasi kebencanaan untuk warga yang berada di lokasi rawan bencana. Melalui media baru dan pola pendidikan sekolah komunitas, sebagaimana dilakukan oleh SGM, kesadaran tentang risiko bencana dapat dimiliki warga. Literasi kebencanaan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang (memilih) tinggal di 'zona merah', tapi juga kepada pelaku wisata dan para pengunjung destinasi wisata yang tersebar di kawasan ini. Dengan demikian, risiko bencana dapat dieliminasi bahkan direduksi. Dalam konteks Merapi, gagasan-gagasan SGM perlu disambut oleh pelbagai stakeholders yang memiliki peran otoritatif. Tugas berat SGM tidak hanya sebatas memberikan injeksi pengetahuan kepada warga tentang isu kebencanaan, tapi juga mencari formulasi paling efektif untuk melihat kembali regulasi terkait status kawasan Merapi. Regulasi tersebut menjadi pintu masuk untuk merumuskan bentuk-bentuk praksis mitigasi bencana. Ambiguitas pemerintah daerah dalam memandang kawasan Merapi menjadi kendala yang cukup signifikan. Upaya SGM untuk terus menyuarakan ide dan protes terhadap kebijakan tentang Merapi diharapkan mampu membawa angin perubahan yang lebih baik untuk warga Merapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ambar Sari. 2007. *Aku Ngeblog Maka Aku Ada*. News Letter Kombinasi, Edisi 20 Mei.
- Habermas, Jürgen. 2006. *The Public Sphere: an Encyclopedia Article*. Dalam Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (eds.), *Media and Cultural Studies: Keywords*. Blackwell Publishing.
- Habibi, Zaki. 2007. *Citizen Journalism: Ketika Berita tidak Hanya Memiliki Satu Muka*. Dalam Jurnal Komunikasi, Vol 1 No 2, April. Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII.
- Hapsari, Dwi Retno. 2014. *Peran Media Baru dalam Perkembangan Gerakan Sosial dalam Demokrasi dalam Ruang Virtual*. Jakarta: ISKI
- Heywood, Andrew. 2013. *Politics 4th Edition* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hiariej, Eric and Kristian Stokke (eds). 2018. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: YOI & PolGov DPP.
- Nazaruddin, Muzayin. 2009. *Blog: Menuju Virtual Public Sphere?* Jurnal Komunikasi Vol 4. No. 1, Oktober (63-72). Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII.
- Robet, Robertus & Hendrik Boli Tobi. 2014. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sumber Lain:**
- Introduction to Disaster Risk Reduction. 2011. USAID.
- Parjanto, Nunung. 2010. New Media, HAM, dan Ilmu Komunikasi: Aras dan Arus Perhatian (teks pidato pengukuhan guru besar UGM). Yogyakarta, 2 November.
- Internet:**
- <http://goenawanmohamad.com/2013/02/07/promotheus/>
- <http://topdocumentaryfilms.com/internet-own-boy-story-aaron-swartz/>
- Abugaza, Anwar. 2013. Social Media Politica.

Jakarta: Tali Writing & Publishing House

<https://sekolahgunungmerapi.wordpress.com/2015/09/07/hello-world/>

[https://sekolahgunungmerapi.wordpress.com/2016/04/11/the-life-in-red-1-implications-of-the-krb-iii-status-on-public-infrastructure-and-community-based-organisation-in-ngrangkah-](https://sekolahgunungmerapi.wordpress.com/2016/04/11/the-life-in-red-1-implications-of-the-krb-iii-status-on-public-infrastructure-and-community-based-organisation-in-ngrangkah-cangkringan-merapi/)

http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-30/6/88/Lava_Tour_Targetkan_800_Wisatawan

<https://sekolahgunungmerapi.wordpress.com/2017/04/03/premanisme-negara-di-lereng-merapi/>

Wawancara dengan Fajar Radit, pengelola Sekolah Gunung Merapi, 9 Agustus 2018.